

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah partai yang muncul sejak Zaman Pergerakan Nasional Indonesia. Pada awalnya partai ini dirintis sejak dikenalkan ide Komunisme oleh Hendricus Josephus Franciscus Marie Sneevliet, seorang sosial demokrat Belanda yang terpengaruh Marxisme Leninisme setelah Internasionale II. Henk Sneevliet datang ke Indonesia dan bekerja di Semarang menjadi sekretaris asosiasi dagang. Kota Semarang merupakan pusat Serikat Buruh Kereta Api Indonesia yaitu *Vereeniging van Spoor-en Tramwegpersonel (VSTP)*. Sneevliet masuk ke VSTP dan mulai menyebarkan pemikiran-pemikiran Marxisme sehingga pada 9 Mei 1914 ia mendirikan *Indische Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV)* berarti “Ikatan Sosial Demokrat Hindia” di Surabaya, dengan bantuan tiga orang Belanda diantaranya H.W. Dekker, Bergsma, dan Brandsteder. (Ramadhan, 2012).

Awalnya, ISDV hanya berisikan anggota-anggota dari Belanda. Namun, karena hanya diisi orang Belanda, ISDV tidak bisa berkembang lebih besar. Terutama, Sneevliet menyadari bahwa anggota yang hanya diisi orang Belanda kurang dapat mengerti permasalahan di negeri jajahan. Karena itu, mulailah ISDV menjalin aliansi dengan Insulinde atau Kepulauan Hindia. Insulinde adalah partai yang didirikan pada Tahun 1907 beranggotakan 6.000 orang. Namun, pada 1916 aliansi tersebut harus terputus sebab perbedaan orientasi. Insulinde lebih ingin merebut kepemimpinan dari orang-orang berbangsa Eropa dan digantikan dengan kepemimpinan dari kalangan Eurasia serta orang-orang Indonesia yang terdidik. Dengan tujuannya itu, akan sulit bagi Insulinde mendapat dukungan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, ISDV menemukan aliansi baru yang cukup potensial karena memiliki massa yang banyak yaitu Sarekat Islam (SI) (Susatyo, 2008).

Perkembangan aliansi antara ISDV dengan SI melahirkan tokoh-tokoh pribumi yang mengamini komunisme seperti Semaun, seorang buruh kereta api sekaligus anggota partai SI Cabang Surabaya hingga pada Tahun 1915 pindah ke Semarang. ISDV pada gilirannya pun menargetkan basis massa yang banyak dan progresif, serta menjadi sungguh-sungguh sebagai badan Komunis setelah Revolusi Rusia 1917. Pada Bulan Mei 1920, ISDV berganti nama menjadi Partai Komunis Hindia, lalu ganti kembali pada 1924 menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI) (Shiraishi, 2005).

Hubungan PKI dengan SI tidak dapat berlangsung lama. SI mulai banyak terpengaruh dalam ide Agus Salim yang merapat kepada Pan-Islamisme. Sementara itu, PKI menerbitkan surat kabar berbahasa Belanda dengan judul *Het vrije word* atau Kata yang Bebas, pada November 1920. Didalamnya berisi tulisan tesis-tesis Lenin yang mengecam Pan-Asianisme dan Pan-Islamisme. Maka PKI menjadi organisasi yang dinilai anti terhadap Islam. Maka hal itu pula menjadikannya perjalanan PKI dan SI menjadi konflik satu sama lain (Ramadhan, 2012). Dalam Surat Kabar *Het Wvije Word* juga Sneevliet banyak menuliskan kritik terhadap kebijakan kolonial dan memuja tindakan pembebasan melalui pemberontakan rakyat. Kiprah-kiprahnya Sneevliet juga banyak melakukan kritik terhadap pemerintah-pemerintah pribumi seperti kebanyakan Jawa yang memberikan sikap pro terhadap pemerintah kolonial. Hal ini membuat akhirnya muncul gerakan nasionalis Jawa dan gagasan pergerakan rakyat yang akhirnya disadari oleh pemerintah (Jauhari, 2018).

Sehingga pada Oktober 1921, dilakukanlah Disiplin Partai oleh Tjokroaminoto yang membuat anggota SI tidak diperbolehkan menjadi anggota dari partai lain, kecuali beberapa organisasi seperti Muhammadiyah. Anggota PKI pada gilirannya dikeluarkan dari *Central Sarekat Islam* (CSI), dan penyelesaian konflik antar keduanya memunculkan kubu Tjokroaminoto yang ingin SI menggunakan Islam sebagai satu-satunya asas dan tidak dipengaruhi Komunisme, maka SI terpecah menjadi dua yaitu SI merah berideologi Islam dan Komunisme,

dan SI Putih berideologikan Islam. SI merah berpusat di Semarang yang merupakan pusat dari ISDV. SI Merah diketuai oleh Semaun dan Sekretaris Jenderal adalah Alimin. Ideologi Komunisme juga dikembangkan oleh peran Mas Marco Kartodikromo dan Haji Misbach. Marco membuat Surat Kabar Dunia Bergerak, sementara Misbach melakukan sintesisme antara Islam dengan Komunis. (Shiraishi, 2005).

Dalam sejarah perjuangannya, PKI telah melakukan pemberontakan besar. Pertama pada November 1926 di Jawa dan Januari 1927 di Sumatera. Pemberontakan PKI yang dinilai reaksioner kawan-kawan Komunis dari luar negeri seperti Komunis Internasional hingga pemimpin PKI yang sedang berada di Singapura yaitu Tan Malaka, setelah kepemimpinan Semaun pada 1922 saat dipenjara karena dituduh merencanakan demonstrasi besar yaitu pemogokan buruh melalui VSTP, akhirnya pecah dasar luasnya semangat perlawanan kepada Pemerintah Hindia Belanda. Namun, pemberontakan yang tidak terorganisir dengan baik tersebut dapat dengan mudah ditekan oleh Belanda. Para pemimpin-pemimpin pemberontakan ditangkap dan dibuang ke Boven Digul, sementara sisanya melarikan diri ke negara asing. Hal itu kemudian mengakhiri kegiatan pertama PKI di Indonesia (Shiraishi, 2005).

Tahun 1935, membawa Musso kembali ke Indonesia tepatnya Kota Surabaya dari Uni Soviet, tempat pelariannya setelah pemberontakan 1926 di Jawa. Musso tiba di Surabaya membangun kembali PKI Bawah Tanah atau PKI Ilegal sebagai utusan dari Moskow untuk membina kembali kader-kader PKI dalam organisasi bayangan hingga pasca kemerdekaan Indonesia yaitu pada Bulan Oktober 1945. PKI saat itu berjalan ilegal sebab status ilegalnya masih belum dicabut oleh Pemerintah Hindia Belanda pasca pemberontakan PKI 1926-1927. PKI ilegal itu dibangun Musso bersama Pamudji, Djokosujono, dan Achmad Sumadi, yang nantinya organisasinya lebih dikenal dengan sebutan Partai Komunis Muda di Jawa Timur (Susatyo, 2008).

Sewaktu di Soviet, Musso menjadi agen Komintern untuk menyampaikan komando-komando Komintern ke Indonesia. Musso pulang dengan membawa doktrin Georgio Dimitrov sebagai Sekretaris Jendral (sekjen) Komintern, bahwa kerjasama antara kaum Komunis dengan Imperialis serta Borjuis Nasional dianjurkan demi meruntuhkan Fasisme yang Chauvinis dan buas. Sehingga saat Jepang datang ke Indonesia untuk merebut Indonesia dari Belanda, tokoh PKI yang pernah dibuang ke Boven Digul melakukan kerja sama dengan Belanda untuk melawan Jepang. Kerja sama itu disebut dengan Serikat Indonesia Baru (Sibar). Doktrin itulah yang dipegang oleh para anggota PKI Ilegal sebelum akhirnya Musso kembali lagi ke Uni Soviet hingga April 1948 kembali lagi ke Indonesia.

Sepulangnya Musso dari Uni Soviet pada 1948, ia mendemonstrasikan doktrin baru yaitu Andrei Alexandrovich Zdanov, mengagaskan penghentian kerja sama dengan kapitalis imperialis ke Indonesia (Syukur, 2008). Doktrin Zdanov itu dituangkan dalam tulisan teoritisnya berjudul “Jalan Baru”. Keadaan masa itu didorong atas banyaknya masyarakat dan elitis yang tidak puas atas hasil Perjanjian Renville. Di sisi lain, juga terjadi konflik internal tentara, akibat keputusan Komite Nasional Indonesia Pusat terhadap Reorganisasi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (ReRa). Sehingga kondisi tersebut dimanfaatkan Musso dengan bantuan Amir Syarifudin untuk memecah pemberontakan besar keduanya yaitu di Madiun pada 1948. Akhirnya pagi hari di Madiun pada 19 September 1948 diproklamasikan oleh Supardi, Sumarsono, dan kawan-kawannya berdirinya Soviet Republik Indonesia dan dibentuknya Front Nasional. Pada saat diumumkan pemerintahannya Front Nasional di Madiun, Musso dan Amir Syarifudin tengah berkampanye ke beberapa daerah RI seperti Pati, Bojonegoro, dan Cepu. Sementara pimpinan anggota CCPKI sedang mengadakan rapat pada 17 September 1948 di Yogyakarta (Susatyo, 2008).

Kejadian itu lantas mengindikasikan bahwa PKI ingin mengganti Ideologi Pancasila di Indonesia menjadi Komunisme (Susatyo, 2008). Peristiwa Madiun pun ditafsirkan sebagai pemberontakan Komunis oleh

Soekarno, sehingga ia segera menyiarkan seruan untuk penumpasan pemimpin dan anggota PKI. Penumpasan pemberontakan tersebut ditugaskan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mengejar para pemberontak. Termasuk Musso yang melarikan diri ke Semanding, Jawa Timur dan mati terkena tembak oleh Letnan Satu Sumadi pada 31 Oktober 1948. Sementara itu, Amir Syarifudin bersama kawan-kawannya bersembunyi di Gua Macan, Purwodadi. Namun, mereka segera ditangkap dan semua tawanan dibawa ke Purwodadi. Pada 19 Desember 1948, meletus Agresi Militer II yang menyebabkan para tawanan dijatuhi hukuman mati di Desa Ngalihan, Kelurahan Lalung, Kabupaten Karanganyar, Kota Surakarta. Mereka yang dijatuhi hukuman mati diantaranya ialah Amir Syarifudin (Pemimpin Pemberontak, Pemimpin FDR, dan Pertahanan Politbiro CCPKI), Maruto Darusman (Sekretaris Jenderal Politbiro), Sardjono (Agitasi Propaganda CC PKI), Oei Gee Hwat (Ketua Penerangan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia/SOBSI), Djokosujono (Gubernur Militer Madiun), Harjono (Ketua Umum sobsi), S. Kama (Residen PKI Semarang), Katamhadi (Mantan Jenderal Mayor Tentara Laut Republik Indonesia/TLRI), Ronomarsono (Pimpinan Pemuda Sosialis Indonesia/Pesindo), dan D. Mangku (Aktivis PKI di Solo) (Susatyo, 2008).

Pemberontakan tersebut membuat PKI beku dalam waktu dua tahun. Selain pemimpin Komunis yang terbunuh, ada juga sekitar 36.000 anggota dan simpatisannya dipenjara. Hingga pada 1951, PKI muncul kembali ke permukaan dan berupaya reorientasi partai di bawah pimpinan D.N. Aidit. Aidit sendiri telah mengenal ide Marxisme sejak 1943. Ia juga sangat terpengaruh Nasionalisme Soekarno dan Muhammad Yamin. Pada 14 Maret 1954 dilakukan Kongres Nasional PKI ke V, ia bersama M.H. Lukman terpilih menjadi anggota Politbiro PKI. Mereka kembali dari pelariannya di Vietnam setelah 1948. Awal kemunculannya Aidit masih sibuk membangun kembali PKI dan menegaskan garis kepemimpinannya. Meskipun keduanya terinspirasi dari kemenangan Komunis Tiongkok dan Vietnam dengan mengangkat senjata, tapi itu dikarenakan Partai Komunis

disana tidak diberikan hak untuk mengikuti jalur legal. Kondisi tersebut berbeda dengan Partai Komunis Indonesia yang masih diberikan hak untuk dapat masuk ke dalam parlemen (Mortimer, 1969).

Aidit dan Lukman, serta politbiro lainnya yaitu Njoto mulai sibuk dengan pembersihan nama partai setelah pemberontakan PKI di Madiun 1948 (*Madiun Affair*). Selain itu, PKI juga rutin berkampanye untuk partisipasi politik dalam Pemilu 1955. Kembalinya PKI cukup menarik banyak simpatisan masyarakat, dibuktikan dengan kemenangannya pada Pemilu 1955 menjadi partai nomor 4 dengan suara terbanyak (Soedarmo & Ginanjar, 2014).

Namun, kejayaan PKI tidak dapat bertahan lama. Peristiwa Gerakan 30 September 1965 / G30S telah membuat PKI dituduh terlibat dalam penculikan dan pembunuhan beberapa dari Anggota Perwira Angkatan Darat yang memiliki jabatan penting dalam Markas Besar Angkatan Darat (MBAD). Seluruh anggota PKI, organisasi-organisasi yang tercatat berafiliasi dengan PKI seperti Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), dan Pemuda Rakjat (PR) diberangus oleh Panglima Kostrad Mayjen Soeharto yang mengambil alih kepemimpinan secara sepihak (Ghofur, 2010).

Untuk kedua kalinya, PKI kembali dituding sebagai partai yang ingin menggantikan ideologi Pancasila menjadi Komunis. Peristiwa G30S hingga hari ini diingat sebagai pengkhianatan PKI terhadap Pancasila. Hal tersebut menimbulkan ketakutan masyarakat akan hal-hal yang berbau komunisme. Doktrin setelah tahun 1966 yang dilakukan oleh Soeharto berhasil membuat banyak orang yang mempercayai bahwa PKI ingin menggantikan paham Pancasila.

Mengutip dari Artikel Zayadi, 2021 berjudul Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa dikatakan bahwa tujuan G30S adalah untuk menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mendirikan negara Komunis. Hal itu sejalan dalam Artikel BM, 2021

berjudul *Reinventing Pancasila* juga mengungkapkan bahwa tujuan Pemberontakan PKI di Madiun 1948 dan G30S adalah untuk mendirikan negara Soviet dan menggantikan ideologi Pancasila dengan Komunisme.

Polemik terkait PKI dan Pancasila kemudian bermunculan dalam bahasan politik maupun akademik. Sukmawati putri Presiden Pertama Soekarno pun sempat menyatakan bahwa PKI tidak menolak Pancasila sebagai Ideologi negara. Hal itu didukung oleh narasi Asvi Warman Adam, Sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bahwa selama terjadinya Sidang Dewan Konstituante Tahun 1957, PKI berada di garis pendukung Pancasila sebagai dasar negara (“Kala Sukmawati Memantik Polemik: PKI Menganut Pancasila,” 2020).

Sejalan dengan itu, Aidit sebagai Pemimpin PKI 1955 juga mengungkapkan bahwa PKI menghendaki Pancasila masuk dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI). Kaum Komunis mempercayai bahwa sikap tersebut tidak bertentangan dengan Marxisme sebagai akar dari Ideologi Komunisme, bahkan merupakan sikap Marxis yang tepat. Namun, pidato Aidit pada 1964 pada gilirannya justru menjadi antitesis dari ungkapannya sendiri ketika ia mengatakan bahwa Pancasila adalah alat pemersatu, ketika persatuan telah tercapai, maka Sosialisme Indonesia telah terwujud. Setelah Sosialisme Indonesia terwujudkan, maka Pancasila sudah tidak dibutuhkan lagi.

Penelitian sebelumnya dengan topik yang relevan pernah dilakukan oleh Kristian Siburian, 2022 berjudul *Beberapa Tinjauan Ideologi Pancasila Dalam Menentang Adanya Komunisme di Indonesia* yang menilai bahwa Ideologi Marxisme Leninisme tidak dapat berintegrasi dengan Pancasila yang salah satu silanya memiliki nilai spiritual. Sehingga menempatkan PKI sebagai bahaya laten. Sejalan dengan penelitian tersebut, (Muhammad, Ramadhani, Muhammad, & ..., 2019) juga melakukan penelitian berjudul *Perkembangan Paham Ideologi Terlarang Indonesia sama-sama menempatkan PKI sebagai bahaya laten Pancasila yang hendak menggantikan Ideologi Pancasila dengan Komunisme.*

Oleh karena itu, penelitian ini penulis lakukan untuk menganalisis dan mendeksripsikan perspektif serta sikap para elite PKI terhadap Ideologi Pancasila sebagai dasar negara, sebab PKI dan Pancasila pasca Orde Baru hingga hari ini masih terus menjadi polemik dalam politik, akademik, bahkan masyarakat. Sebagai seorang peneliti sejarah, menurut penulis penting untuk menuliskan narasi berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang ada.

Penelitian ini berjudul Sikap Elite Partai Komunis Indonesia terhadap Pancasila sebagai Dasar Negara pada Tahun 1945-1965. Elite adalah kelas masyarakat yang mengindikasikan adanya seseorang atau kelompok yang lebih besar, baik peranan, materi, dan lain sebagainya. Peter Burke menarasikan jelas terkait kelas-kelas dalam masyarakat dengan berbagai perspektif para ahli. Misalnya dari Marx mendefinisikan kelas dengan golongan yang didasari pada peranan produksi dalam ekonomi klasik seperti pemilik tanah, pemilik modal, dan kelas yang tidak memiliki keduanya yaitu pekerja. Karena itu, Marx mengatakan bahwa sejarah ini adalah sejarah pertentangan kelas (Burke, 2011).

Sementara Weber dalam perspektif Sosiologi lebih menggambarkan kelas sebagai kelompok sosial yang kelasnya ditentukan oleh pasar. Untuk menaikkan kelas dalam masyarakat, kaum elite sekitar abad ke 16 dan 17 di Polandia, Inggris, Italia, dan lain-lain melakukan konsumsi berlebihan untuk memamerkan kelebihan dan kekayaan.

Dalam buku Sartono, perkembangan sejarah elite, utamanya di dunia ketiga memunculkan para elite yang lahir dari kaum intelegensia baru. Mereka adalah orang-orang yang mendapat pendidikan asing, lalu kembali ke tanahnya untuk menggantikan sistem lama, yaitu kolonialisme dan elite tradisional hasil pendidikan Barat (Kartodirdjo, 1983). Merujuk pada definisi tersebut, maka Elite PKI adalah representatif dari elite politik yang menjadi pendorong perubahan. Dapat dikatakan juga sebagai elite revolusioner.

Dalam hal itu, maka peneliti mengambil tokoh sejumlah pemimpin politik PKI setelah Revolusi Indonesia sebagai elite revolusioner, yaitu Musso, Alimin, D.N. Aidit, serta M.H. Lukman dan Njoto sebagai Sekretaris Jenderal I dan II. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Rewang selaku pembangun Barisan Tani Indonesia (BTI) dalam wawancara (Ramadhan, 2012) yang mengungkapkan bahwa terdapat proses dalam sejarah PKI menuju legal yang akhirnya memunculkan beberapa tokoh-tokoh tersebut sebagai pemimpin dan Politbiro PKI baru. Politbiro PKI adalah organ politik tertinggi setelah Komite Pusat PKI.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Dalam melakukan penelitian sejarah diperlukan adanya pembatasan masalah, hal ini agar bahasan yang dikaji tidak melebar jauh dari pokok bahasan utama dan permasalahan yang ingin dipecahkan. Selain itu pembatasan juga diperlukan agar lebih memudahkan peneliti dalam melakukan historiografi.

Berdasarkan tahap heuristik yang telah dilakukan oleh penulis, muncul ide dan ketertarikan penulis untuk meneliti mengenai sikap elite Partai Komunis Indonesia terhadap Pancasila sebagai Dasar Negara. Pembatasan berdasarkan aspek temporal dari penelitian ini ialah pasca kemerdekaan Indonesia hingga pemberangusan Partai Komunis Indonesia (1945-1965).

2. Perumusan Masalah

Setelah memaparkan dasar pemikiran, maka penulis akan mengajukan pertanyaan untuk memfokuskan penelitian, diantaranya:

- 1) Bagaimana sejarah dirumuskannya Dasar Negara Pancasila dan Ideologi Marxisme?
- 2) Mengapa Partai Komunis Indonesia selalu dinarasikan bertentangan dengan Pancasila?

- 3) Bagaimana sikap elite Partai Komunis Indonesia terhadap Pancasila?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian dengan judul “Sikap Elite Partai Komunis Indonesia terhadap Pancasila sebagai Dasar Negara pada Tahun 1945-1965” ini bertujuan untuk memberikan analisis deskriptif mengenai mengapa Partai Komunis Indonesia selalu dinarasikan bertentangan dengan Pancasila dan bagaimana sikap elite Partai Komunis Indonesia terhadap Pancasila.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah khasanah tulisan sejarah politik di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembaharuan dalam penelitian sekaligus memberikan ruang bagi peneliti selanjutnya untuk membahas topik-topik yang berkaitan. Selain itu juga penelitian ini dapat merubah perspektif lama kepada para pembaca dan peneliti selanjutnya.

D. Kerangka Analisis

Partai Komunis Indonesia memiliki dasar ideologi hasil dari pemikiran Karl Marx dan Friedrich Engels, yang nantinya akan sering dikenal dengan Filsafat Marxis. Mereka merumuskan filsafat baru yang menelusuri sekaligus mengkritik puncak-puncak sejarah filsafat tersebar pada zamannya. Hasil dari pemikiran filsafat tersebut menghasilkan epistemologi Materialisme Dialektika Historis (MDH), yang memiliki dua arti utama yaitu sistematika empiris tentang hukum gerak umum realitas alam, pikiran, dan sosial. Kedua, yaitu teori mengenai hukum gerak umum

realitas sosial spesifik yaitu tentang cara produksi kapitalis. Karena itu, Filsafat Marxis ini berjalan menjadi sebuah ilmu pengetahuan bahkan hingga menjadi suatu pandangan hidup, utamanya yang diterapkan oleh Partai Komunis di seluruh dunia, termasuk Indonesia (Ricardo, 2021).

Sementara itu, di Indonesia tepatnya setelah kemerdekaan telah memiliki suatu pandangan hidup yang dijadikan dasar negara, yaitu Pancasila. Menurut Franz Magnis, Pancasila adalah kesepakatan rakyat Indonesia. Jika dilihat dari sudut pandang etika politik pasca-tradisional, bahwa filsafat etika berupaya untuk mencerahi perbuatan-perbuatan manusia yang ditawarkan oleh jawaban-jawaban yang bijaksana. Terdapat empat prinsip yaitu kebebasan beragama, hormat pada hak-hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan sosial (Magniz, 2016). Maka, nilai-nilai Pancasila berdasarkan prinsip etis oleh Franz Magnis yang akan menjadi bahan analisis sikap PKI terhadap Pancasila Pancasila, sebagai berikut.

1	Ketuhanan yang Maha Esa	<ul style="list-style-type: none"> - Kebebasan beragama - Pluralisme
2	Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai-nilai kemanusiaan universal - Hak-hak asasi manusia - Penolakan terhadap kekerasan sebagai sarana pemecahan konflik
3	Persatuan Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - Nasionalisme
4	Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan	<ul style="list-style-type: none"> - Demokrasi
5	Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - Solidaritas bangsa negara adil sejahtera

E. Metode dan Sumber Penelitian

Metode penelitian adalah bagian penting untuk memudahkan peneliti dalam menulis penelitian. Pada penelitian yang berjudul “Sikap Elite Partai Komunis Indonesia terhadap Pancasila sebagai Dasar Negara pada Tahun 1945-1965”, peneliti akan memaparkan prosedur dalam mencari, mengolah dan menganalisis data yang didapatkan.

Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode historis yaitu proses menguji dan menganalisa secara kritis dari peninggalan dan rekaman pada masa lampau (Gottschalk, 1975). Menurut (Sjamsuddin, 2012) metode sejarah merupakan prosedur, proses, atau suatu teknik yang sistematis dalam menyelidiki disiplin ilmu tertentu untuk mendapat objek atau bahan-bahan yang sedang diteliti.

Dengan menggunakan metode sejarah, maka peneliti dapat merekonstruksi peristiwa yang dialami masa lampau. Metode historis digunakan sebab tidak banyak sumber primer sejarah yang dapat diakses untuk mengetahui peristiwa masa lampau. Data dan hasil dari peninggalan di masa lampau akan digunakan sebagai alat bagi peneliti untuk merekonstruksi sejarah.

Dalam metode sejarah, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan apabila hendak melakukan penelitian sejarah. Menurut (Gottschalk, 1975), bahwa metode sejarah memiliki beberapa tahapan, diantaranya adalah:

1. Heuristik, yaitu kegiatan mencari sumber-sumber, data-data, materi sejarah, atau bukti sejarah. Pada tahapan ini, peneliti harus menggunakan banyak waktu sebab dalam mencari data yang dapat dijadikan sumber, utamanya sumber primer harus sangat teliti.

Sumber sekunder yang peneliti jadikan dalam penelitian ini diantaranya adalah buku yang ditulis oleh John Roosa berjudul “Dalih Pembunuhan Massal” Tahun 2008. Selanjutnya terdapat buku berjudul “Pemberontakan PKI di Madiun” oleh Susatyo, 2008. Dan beberapa jurnal lain yang mendukung pembahasan penelitian.

Sumber-sumber sekunder saya temui di beberapa perpustakaan yang ada di UNJ, Ruang Baca Sejarah, dan Perpustakaan Nasional. Sementara sumber primer yang peneliti dapatkan yaitu Surat Kabar Warta Bandung Tahun 1957 serta buku yang diterbitkan oleh Yayasan Pembaharuan berisi pidato-pidato pimpinan PKI di Tahun pembahasan. Beberapa sumber lainnya juga peneliti dapatkan dari Perpustakaan Nasional Lama di Salemba dan Arsip dari Website Arsip Marxisme.org.

2. Kritik Sumber, merupakan tahap penyaringan atau memilih-milih sumber yang telah didapatkan pada kegiatan heuristik. Tahapan ini dilakukan untuk mencari validitas dan relevansi sumber. Tahap ini terbagi atas dua hal yaitu kritik eksternal dan kritik internal.
 - a) Kritik Eksternal adalah verifikasi terhadap aspek-aspek luar dari sumber sejarah. Kritik eksternal dilakukan untuk menguji suatu otentifikasi atau keaslian sumber, sehingga data yang diperoleh adalah asli. Peneliti berupaya untuk mengamati hal-hal eksternal dari sumber yang telah peneliti dapatkan. Misalnya, banyak sumber primer yang peneliti dapatkan dari website maka peneliti memastikan bahwa website tersebut terafiliasi dengan lembaga yang dapat dipertanggungjawabkan seperti Archive.org yang terafiliasi dengan *American Library Association* (ALA). Sementara untuk sumber seperti surat kabar, peneliti juga mendapatkannya dari lembaga yang bertanggung jawab seperti Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, serta mengamati bentuk tulisan, kertas, dan lain-lain.
 - b) Kritik Internal, adalah verifikasi terhadap aspek-aspek di dalam sumber, atau isi dari sumber. Pada tahapan ini menentukan apakah isi dari sumber sejarah dapat dipercaya informasi dan kebenarannya.
3. Interpretasi, yaitu penjabaran dari sumber yang telah dipilih-pilih melalui kritik sumber. Pada tahapan ini peneliti memaparkan hasil

interpretasi dari fakta-fakta sumber yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Historiografi, merupakan tahapan terakhir dari metode sejarah. Tahapan ini dilakukan dengan menarasikan fakta-fakta sejarah dalam tulisan yang mudah dan menarik untuk dibaca.

Sumber Penelitian

Sumber-sumber yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah beberapa buku, surat kabar pada Tahun 1945 - 1965, majalah terbitan 1945 - 1965, serta jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam mendapatkan sumber-sumber penelitian ini, penulis mengunjungi beberapa perpustakaan seperti Perpustakaan Nasional Indonesia Jalan Salemba dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Jalan Merdeka Selatan. Selain itu, penulis juga mengunjungi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Sejauh ini beberapa sumber primer telah didapatkan penulis yang terdiri dari majalah dan surat kabar, diantaranya yaitu Aidit, D. N (1955). *Untuk Kemenangan Front Nasional dalam Pemilihan Umum*. Jakarta: Yayasan Pembaruan. Aidit, D. N (1963). *Beberapa Soal Revolusi Indonesia dan PKI*. Jakarta: Yayasan Pembaruan. Lukman, M. H. (1959). Pidato Pengantar untuk Rencana Perubahan Konstitusi Partai. *Bintang Merah*. Lukman, M. H. (1961). *Apa Sebab Revolusi Agustus 45 Belum Selesai*. Jakarta: Yayasan Universitas Rakyat. Dan Surat Kabar Warta Bandung 1957.

Sementara itu, sumber sekunder sementara yang didapatkan oleh penulis terdiri dari buku-buku dan jurnal-jurnal, diantaranya yaitu buku Lahirnya Pancasila: Pemberontakan PKI-Musso di Madiun 18-30 September 1948 karya Susatyo 2008, Jurnal *The Downfall of Indonesia Communism* karya Rex Mortimer 1969, Konflik Ideologi di Tubuh Partai Komunis Indonesia Priode 1951-1959: Marxis-Leninis Versus Revisionisme Modern karya Ramadhan 2012, Manuskrip Sejarah 45 Tahun PKI 1920 – 1965 karya Busjarie Latief, dan lain-lain.